

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Iswanto, 2015).

Upaya untuk membangun suatu wilayah, pemerintah daerah diharuskan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor yang berpotensi menjadi nilai tambah daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Menurut Tarigan (2005), teori basis ekonomi dapat digunakan untuk menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan pada besarnya pertambahan nilai ekspor dari wilayah tersebut yang dapat dibedakan menjadi sektor basis (sektor yang mampu mengekspor barang atau jasa yang dihasilkan) dan non basis (sektor yang hanya dapat menghasilkan barang atau jasa untuk penduduk wilayah itu sendiri). Salah satu faktor yang menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu

dengan meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut (Fitriyah & Prabowo, 2021).

Selama pembangunan, pemerintah daerah mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai distribusi pendapatan yang merata. Akan tetapi, dalam prakteknya kedua hal tersebut sulit dicapai. Hal ini terjadi dikarenakan *trade off* atau pertukaran antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi (Fitriyah & Prabowo, 2021). Pembangunan ekonomi juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan wilayah. Menurut Sjafrizal (2018), ketimpangan ekonomi antar daerah yaitu perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal diukur dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Hal ini juga tidak terlepas dari perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, dan kemampuan dalam mengelola sumber daya tersebut.

Ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan peristiwa umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah Sjafrizal (2018). Distribusi atau persebaran pembangunan ekonomi yang kurang merata menyebabkan berbagai masalah baik dari segi ekonomi, budaya, dan sosial. Sehingga negara memiliki arah kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah (Hisbullah Febrianto & Budi Santoso, 2021).

Masalah ketimpangan tidak hanya terjadi pada negara berkembang saja, namun juga pada negara maju. Perbedaan ketimpangannya adalah besar kecilnya tingkat ketimpangan yang terjadi dan cara mengatasinya, dimana cara menyelesaikannya dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk (Renggo, 2021).

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah ketimpangan ekonomi. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sehingga dalam prakteknya bagaimana proses pembangunan yang terjadi di daerah tersebut dapat dimaksimalkan kearah pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai keunggulan kompetitif di setiap daerah untuk dikembangkan. Apalagi Jawa Timur merupakan provinsi yang sangat potensial dengan potensi perkembangan ekonomi yang cukup besar.

Jawa Timur terletak berdampingan dengan provinsi besar lainnya yang ada di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relatif tidak jauh berbeda. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lainnya dari tahun ke tahun nilai PDRB cukup besar dan menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur telah terjadi proses pembangunan jika di lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Sebagai provinsi penyumbang PDRB kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur perlu melihat masing-masing kontribusi setiap sektor. Sebagai sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai tambah ekonomi, sektor unggulan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Timur, pengembangan sektor unggulan menjadi penting. Dengan memperkuat sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tabel 1.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022

Provinsi	PDRB ADHK Tahun 2010 (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI JAKARTA	1.735.208,29	1.836.240,55	1.792.291,09	1.856.075,82	1.953.455,85
JAWA TIMUR	1.563.441,82	1.649.895,64	1.611.392,55	1.668.749,44	1.757.821,43
JAWA BARAT	1.419.624,14	1.490.959,69	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93
JAWA TENGAH	941.091,14	991.516,54	965.227,27	997.345,05	1.050.322,13
SUMATERA UTARA	512.762,63	539.513,85	533.746,36	547.651,82	573.528,77
RIAU	482.064,63	495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98
KALIMANTAN TIMUR	464.694,43	486.523,18	472.393,33	484.438,88	506.158,91
BANTEN	433.782,71	456.620,03	441.148,58	460.963,02	484.141,83
SULAWESI SELATAN	309.156,19	330.506,38	328.154,57	343.395,41	360.874,18
SUMATERA SELATAN	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.411,27	343.483,65
LAMPUNG	232.165,99	244.378,31	240.319,59	246.966,49	257.534,19
KEP. RIAU	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70
SUMATERA BARAT	163.996,19	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54
PAPUA	159.711,85	134.565,89	137.787,29	158.674,30	172.904,85
BALI	154.072,66	162.693,36	147.498,94	143.864,97	150.821,44
JAMBI	142.902,00	149.111,09	148.354,25	153.825,49	161.717,68
KALIMANTAN BARAT	130.596,32	137.243,09	134.743,38	141.212,04	148.368,94
KALIMANTAN SELATAN	128.052,58	133.283,85	130.864,32	135.422,59	142.339,28
ACEH	126.824,37	132.069,62	131.580,97	135.251,19	140.947,64
SULAWESI TENGAH	117.555,83	127.935,06	134.152,69	149.848,82	172.578,03
DI YOGYAKARTA	98.024,01	104.485,46	101.698,52	107.372,56	112.898,32
KALIMANTAN TENGAH	94.566,25	100.349,29	98.933,61	102.481,47	109.094,72
NUSA TENGGARA BARAT	90.349,13	93.872,44	93.288,87	95.437,86	102.074,07
SULAWESI TENGGARA	88.310,05	94.053,52	93.445,72	97.276,36	102.657,94
SULAWESI UTARA	84.249,72	89.009,26	88.126,37	91.790,93	96.767,70
NUSA TENGGARA TIMUR	65.929,19	69.389,02	68.809,61	70.540,66	72.695,28
PAPUA BARAT	60.465,52	62.074,52	61.604,13	61.289,40	62.518,38
KALIMANTAN UTARA	57.459,31	61.417,79	60.746,21	63.162,97	66.534,39
KEP. BANGKA BELITUNG	52.208,04	53.941,90	52.705,94	55.369,65	57.803,20
BENGKULU	44.164,11	46.345,45	46.338,43	47.853,78	49.916,06
SULAWESI BARAT	31.114,14	32.843,81	32.074,02	32.898,23	33.654,78
MALUKU	29.457,13	31.049,45	30.765,89	31.702,75	33.321,87
GORONTALO	26.719,27	28.429,97	28.425,38	29.110,05	30.286,45
MALUKU UTARA	25.034,08	26.597,55	28.031,44	32.739,16	40.248,39

Sumber : BPS Indonesia

Tabel 1.2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita ADHK 2010 (Ribu Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Kediri	298.820,23	312.823,52	294.533,38	300.336,83	310.630,85
Kota Surabaya	134.221,65	141.817,25	136.074,49	141.557,51	150.410,39
Gresik	74.002,95	77.108,96	74.609,32	76.723,45	81.638,65
Pasuruan	61.543,19	64.656,87	64.294,69	66.776,23	70.012,12
Sidoarjo	59.794,62	62.346,15	65.044,04	67.402,04	72.080,35
Kota Malang	57.152,52	60.076,51	60.636,65	63.093,41	66.986,05
Kota Madiun	56.884,33	59.980,77	51.665,74	53.513,40	55.823,27
Kota Batu	53.773,73	56.730,13	51.873,00	53.441,76	56.201,94
Bojonegoro	52.782,21	55.996,29	53.620,99	50.351,34	46.978,70
Mojokerto	49.838,29	52.266,98	51.746,35	53.485,14	56.193,31
Tuban	36.925,91	38.662,17	35.689,61	36.558,64	39.593,68
Kota Mojokerto	36.785,70	38.509,24	36.324,37	37.340,85	39.099,34
Kota Probolinggo	33.465,18	35.123,91	33.594,78	34.664,48	36.483,73
Banyuwangi	32.533,05	34.242,64	31.257,63	32.280,36	33.453,55
Kota Blitar	32.391,07	34.043,32	31.743,57	32.749,48	34.098,54
Kota Pasuruan	28.383,29	29.740,91	27.496,11	28.228,14	29.704,37
Tulungagung	25.036,66	26.261,93	24.321,88	24.977,86	26.072,51
Malang	25.009,33	26.220,06	25.107,69	25.716,45	26.857,46
Lamongan	22.104,03	23.091,73	20.121,62	20.572,26	21.470,84
Sumenep	21.915,53	21.864,29	20.969,69	21.385,10	21.917,93
Jombang	21.329,86	22.323,62	21.020,81	21.534,92	22.520,06
Jember	21.047,33	22.106,49	20.762,80	21.443,53	22.263,79
Blitar	20.981,63	21.986,60	20.420,62	20.877,13	21.798,64
Lumajang	20.744,28	21.644,74	19.638,63	20.072,33	20.775,61
Magetan	20.038,35	20.888,72	19.438,52	19.902,65	20.548,82
Probolinggo	19.253,70	20.011,32	19.882,60	20.472,80	21.323,22
Situbondo	18.967,73	19.903,54	19.381,72	19.926,05	20.712,90
Pacitan	18.952,89	19.875,02	18.518,80	18.854,61	19.770,82
Bangkalan	18.757,37	18.786,49	16.573,24	16.005,03	15.607,95
Madiun	18.322,74	19.274,35	17.703,49	18.106,86	18.701,70
Kediri	17.719,65	18.538,39	17.451,19	17.855,55	18.599,24
Trenggalek	17.501,54	18.345,87	17.125,90	17.634,00	18.312,80
Bondowoso	16.770,12	17.572,84	17.345,24	17.882,09	18.441,12
Nganjuk	16.516,07	17.354,89	16.322,05	16.798,21	17.495,61
Ngawi	15.723,96	16.378,80	15.509,09	15.828,16	16.257,03
Ponorogo	15.637,02	16.348,55	14.956,17	15.295,43	15.653,26
Sampang	14.187,59	14.279,53	14.418,15	14.328,16	14.538,55
Pamekasan	12.476,16	12.949,53	13.093,54	13.469,41	14.025,77

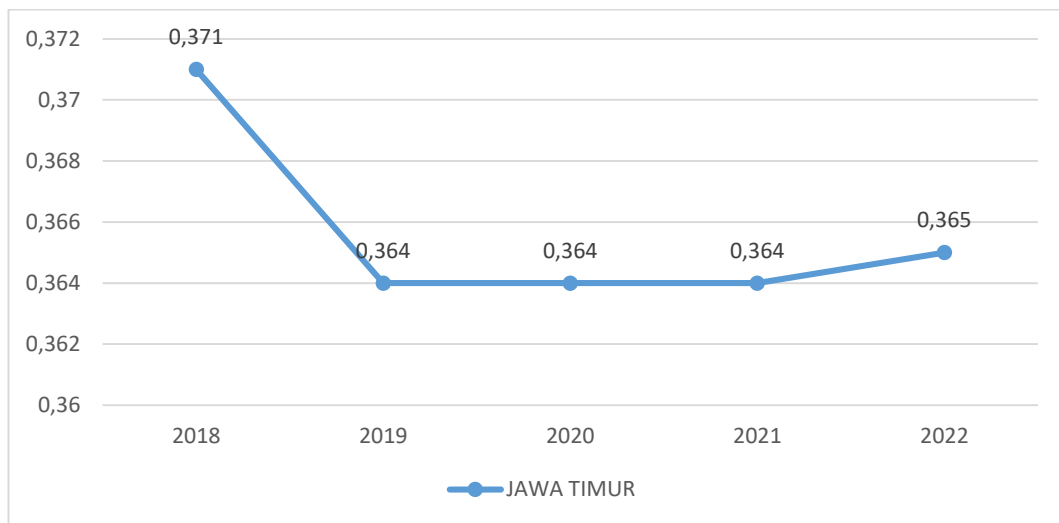
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari tabel tersebut, kesimpulan yang bisa diambil yaitu mengenai kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 2 daerah yang memiliki PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yang pertama Kota Kediri,

dan yang kedua adalah Kota Surabaya. Selain kedua kota tersebut, hampir seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Timur memiliki PDRB per kapita dibawah 100 juta rupiah. Kondisi ketimpangan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah dampak atas pesatnya pertumbuhan perekonomian, dan perkembangan industri pengolahan, sektor jasa, maupun pariwisata yang ada di kedua kota tersebut.

Keadaan yang tidak semestinya terjadi adalah timpangnya PDRB perkapita di daerah yang berdekatan atau bahkan berbatasan langsung dengan Kota Kediri dan Kota Surabaya. Jika dilihat dari geografis dan sumber daya alam yang ada di kedua kota tersebut dengan daerah sekelilingnya tidak jauh berbeda, namun begitu terasa disparitas yang ada. Seperti yang ada pada Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan beberapa daerah di Pulau Madura yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Sedangkan di sekitar Kota Kediri pun juga terdapat kondisi yang sama, seperti halnya Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, dan sebagainya.

Ukuran ketimpangan ekonomi dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah rasio Gini. Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap individu memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan yang maksimal (seorang individu memiliki seluruh pendapatan).



Sumber : BPS Indonesia

Gambar 1.1 Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Jawa Timur Tahun 2018-2022

Ketimpangan juga menjadi salah satu masalah dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang diukur dengan Rasio Gini cenderung menurun, ketimpangan Jawa Timur termasuk rendah. Menurut (Wibowo, 2017) ketimpangan 0,3 yang berarti berada pada tingkat ketimpangan sedang. Selain itu, angka yang fluktuatif menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Jawa Timur sangat mudah/rentan terhadap berbagai kondisi yang ada. Namun demikian, secara umum, kondisi ketimpangan pendapatan antar kelompok penduduk di Jawa Timur relatif membaik setidaknya pada 4 tahun terakhir.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur dapat menyebabkan perbedaan dalam kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di setiap daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah

dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, seperti alokasi sumber daya yang memadai, pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, promosi, dan insentif investasi yang mendukung sektor-sektor unggulan tersebut. Pengembangan sektor-sektor unggulan di setiap wilayah, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata dan pemerataan pendapatan, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan kinerja ekonomi antar daerah dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi yang berbeda antar wilayah. Ilmu Ekonomi Regional dikenal teori-teori tentang tahapan perkembangan ekonomi daerah, mulai dari daerah pada tahap pertumbuhan awal (tahap pembangunan tradisional) sampai daerah yang lebih maju. Daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer (dikenal dengan daerah pertanian) cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah dengan struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor industri maupun perdagangan/jasa. Perbedaan sektor atau komoditas utama yang mengatur struktur ekonomi kabupaten/kota perlu dianalisis. Kabupaten/kota yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian cenderung memiliki nilai tambah relatif rendah akan memiliki kinerja perekonomian yang relatif lebih rendah. Demikian sebaliknya kabupaten/kota yang didominasi oleh sektor industri maupun perdagangan/jasa mampu memberikan nilai tambah yang relatif tinggi.

Karakteristik sektor unggulan yang mendominasi suatu wilayah akan mempengaruhi kemampuan ekonomi suatu daerah untuk berkembang. Daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri, atau daerah dengan jumlah industri besar dan menengah yang banyak cenderung memiliki

pertumbuhan ekonomi atau PDRB yang tinggi. Sebaliknya, pada daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, terutama pada daerah dengan produktivitas rendah, akan sulit bagi daerah tersebut untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka disparitas (ketimpangan) output ekonomi antar daerah akan semakin besar.

Kebijakan utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah memaksimalkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi daerah. Hal ini terkait dengan potensi pengembangan setiap daerah yang sangat berbeda, sehingga setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah yaitu dengan menganalisis atau menggali sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini membahas masalah pembangunan yang tidak merata dan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Keberadaan sektor-sektor unggulan yang potensial di setiap kabupaten/kota juga menjadi permasalahan yang perlu diteliti. Identifikasi sektor-sektor unggulan ini penting untuk mengetahui potensi pertumbuhan yang tinggi di setiap daerah. Tanpa adanya pengembangan sektor-sektor ini, peluang investasi, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat akan terhambat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan di setiap wilayah Jawa Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta pemerataan pendapatan.

Alasan pemilihan topik ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur dan menganalisis sektor

unggulan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di setiap kabupaten/kota. Melalui pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasarkan topik yang dibahas, fokus pada penelitian ini adalah **“Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan Antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sektor manakah yang menjadi sektor basis Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
2. Sektor manakah yang memiliki potensi sebagai sektor unggul dan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
3. Seberapa besar tingkat ketimpangan antar wilayah yang terjadi di wilayah Jawa Timur tahun 2018-2022?
4. Bagaimana keterkaitan antara ketimpangan dengan sektor unggulan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor yang menjadi sektor basis Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor apa saja yang menjadi potensi unggul dan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan antar wilayah yang terjadi di wilayah Jawa Timur tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui keterkaitan antara ketimpangan dengan sektor unggulan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, baik untuk penulis maupun seluruh pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ekonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mempertimbangkan keputusan kebijakan untuk ke depannya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah untuk membangun dan memajukan daerahnya.